

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Transfer Pusat, dan Investasi Daerah Terhadap Kemandirian Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh

Malika Zahra¹, Muttaqien², Darmawati³, Ristati⁴

¹⁻⁴Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, Indonesia

*Email malika.220410172@mhs.unimal.ac.id; muttaqien@unimal.ac.id

Sejarah Artikel:

Diterima 20-09-2026
Disetujui 29-09-2026
Diterbitkan 01-10-2026

ABSTRACT

Regional autonomy and fiscal decentralization in Indonesia are intended to create fiscally independent local governments, yet regencies and cities in Aceh Province remain highly dependent on central government transfers, with an average fiscal independence ratio of only about 14 to 17 percent during 2021–2025. This study aims to analyze the effect of locally-generated revenue (PAD), central government transfers, and regional investment on regional fiscal independence in regencies and cities in Aceh Province. A quantitative approach was employed using secondary panel data obtained from the Directorate General of Fiscal Balance (DJPK) of the Ministry of Finance. The population comprised all 23 regencies and cities in Aceh, all of which were included as the sample through saturated sampling over the 2021–2025 period, resulting in 114 observations. The data were analyzed using panel data regression with EVIEWS 12, and the Chow and Hausman tests indicated that the Fixed Effect Model (FEM) was the most appropriate model. The results show that locally-generated revenue has a positive and significant effect on regional fiscal independence, central government transfers have a negative and significant effect, whereas regional investment has a negative but insignificant effect. The model explains 94.1 percent of the variation in regional fiscal independence. These findings imply that optimizing own-source revenue and gradually reducing dependence on transfers are key strategies for strengthening fiscal independence, while regional investment must be directed toward productive activities so that it can broaden the regional revenue base in the long term.

Keywords: locally-generated revenue; central government transfers; regional investment; regional fiscal independence; fixed effect model

ABSTRAK

Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal di Indonesia bertujuan mewujudkan pemerintah daerah yang mandiri secara fiskal, namun kabupaten/kota di Provinsi Aceh masih sangat bergantung pada dana transfer pemerintah pusat dengan rata-rata rasio kemandirian keuangan hanya sekitar 14 hingga 17 persen selama periode 2021–2025. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Transfer Pusat, dan Investasi Daerah terhadap Kemandirian Daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder berbentuk data panel yang bersumber dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan. Populasi penelitian adalah seluruh 23 kabupaten/kota di Provinsi Aceh yang seluruhnya dijadikan sampel melalui teknik sampling jenuh selama periode 2021–2025, sehingga diperoleh 114 observasi. Data dianalisis menggunakan regresi data panel dengan

bantuan program EViews 12, dan hasil uji Chow serta uji Hausman menunjukkan bahwa Fixed Effect Model (FEM) merupakan model yang paling tepat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemandirian Daerah, Transfer Pusat berpengaruh negatif dan signifikan, sedangkan Investasi Daerah berpengaruh negatif namun tidak signifikan. Model penelitian mampu menjelaskan 94,1 persen variasi Kemandirian Daerah. Temuan ini mengindikasikan bahwa optimalisasi PAD dan pengurangan ketergantungan terhadap dana transfer secara bertahap merupakan strategi utama untuk memperkuat kemandirian fiskal, sementara investasi daerah perlu diarahkan pada kegiatan produktif agar mampu memperluas basis penerimaan daerah dalam jangka panjang.

Kata kunci: Pendapatan Asli Daerah; Transfer Pusat; Investasi Daerah; Kemandirian Daerah; Fixed Effect Model

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Zahra, M., Muttaqien, M., Darmawati, D., & Ristati, R. (2026). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Transfer Pusat, dan Investasi Daerah Terhadap Kemandirian Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 2(6), 11115-11125. <https://doi.org/10.63822/trkn6653>.

PENDAHULUAN

Otonomi daerah merupakan bentuk penerapan desentralisasi yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri, sehingga proses pengambilan keputusan berada lebih dekat dengan masyarakat dan kebijakan yang ditetapkan lebih sesuai dengan kebutuhan lokal (Pratama et al., 2025; Mulkan & Aprita, 2023). Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia yang berlandaskan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bertumpu pada desentralisasi fiskal, yaitu pelimpahan wewenang pengelolaan sumber daya keuangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (Pemerintah Indonesia, 2014; Latifa et al., 2025). Tujuan akhir dari desentralisasi fiskal tersebut adalah tercapainya kemandirian keuangan daerah, yakni kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik dengan mengandalkan sumber pendapatan yang berasal dari daerahnya sendiri, sehingga ketergantungan terhadap pemerintah pusat semakin berkurang (Halim, 2014; Fadhillah et al., 2025).

Secara teoretis, teori federalisme fiskal menjelaskan bahwa pemerintah daerah dapat menyediakan layanan publik secara lebih efisien apabila didukung oleh kapasitas fiskal yang memadai dari sumber-sumber penerimaannya sendiri (Oates, 1972). Dalam kerangka tersebut, Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah merupakan indikator utama kemampuan keuangan internal daerah (Hutagaol et al., 2023). Di sisi lain, transfer dari pemerintah pusat melalui Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) ditujukan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antardaerah (Pemerintah Indonesia, 2022; Setyawan, 2023), tetapi ketergantungan yang tinggi terhadap dana tersebut berpotensi menimbulkan *flypaper effect*, yaitu kecenderungan daerah lebih mengandalkan dana transfer dibandingkan menggali potensi PAD-nya (Zakaria & Lathifah, 2024; Dewi et al., 2024). Adapun investasi daerah diharapkan menjadi penggerak perekonomian yang menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan pada akhirnya memperluas basis pajak serta retribusi daerah (Zulvan & Purbasari, 2024; Agustin et al., 2023).

Provinsi Aceh merupakan lokasi yang relevan untuk mengkaji persoalan tersebut. Sebagai daerah berstatus otonomi khusus berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, Aceh menerima Dana Otonomi Khusus di luar mekanisme transfer reguler (Pemerintah Indonesia, 2006). Besarnya aliran dana transfer ini menimbulkan pertanyaan apakah dana tersebut efektif mendorong kemandirian atau justru memperkuat struktur ketergantungan fiskal. Data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menunjukkan bahwa rata-rata rasio kemandirian keuangan kabupaten/kota di Provinsi Aceh hanya sebesar 15,32% pada tahun 2021, menurun menjadi 14,39% pada tahun 2022 dan 14,34% pada tahun 2023, kemudian meningkat menjadi 16,03% pada tahun 2024 dan 16,50% pada tahun 2025 (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2025). Rasio yang berada di bawah 25% tersebut tergolong rendah sekali dengan pola hubungan instruktif (Halim, 2014), yang menandakan bahwa sebagian besar belanja daerah masih dibiayai oleh dana transfer, sementara kontribusi PAD dan investasi daerah belum optimal dalam memperkuat kapasitas fiskal (Fitriano & Ferina, 2021).

Hasil penelitian terdahulu mengenai determinan kemandirian daerah juga belum konsisten. Pada variabel PAD, Rahmawati (2024) serta Putri dan Berliani (2025) menemukan pengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian daerah, sedangkan Farrakhy dan Dewi (2025) menemukan pengaruh positif tetapi tidak signifikan. Pada variabel transfer pusat, Khoiriyah (2019) menemukan pengaruh positif namun tidak signifikan, Rahmawati (2024) menemukan pengaruh negatif dan signifikan, sementara Kinanti dan Santorry (2025) menunjukkan hasil yang bervariasi menurut jenis transfer, di mana DAU dan DAK

cenderung berpengaruh negatif dan tidak signifikan, sedangkan DBH berpengaruh positif dan signifikan. Pada variabel investasi, Afiah et al. (2021) serta Yusiawati dan Marhaeni (2020) menemukan pengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah, padahal manfaat investasi terhadap penerimaan daerah bersifat tidak langsung karena bekerja melalui pertumbuhan ekonomi dan perluasan basis pajak. Penelitian di Aceh oleh Machfud et al. (2020) telah mengkaji pengaruh PAD, dana perimbangan, dana otonomi khusus, dan tingkat kemiskinan terhadap kemandirian keuangan daerah, tetapi belum memasukkan investasi daerah dan belum mencakup periode setelah pandemi.

Berdasarkan uraian tersebut, kebaruan penelitian ini terletak pada pengujian pengaruh PAD, Transfer Pusat, dan Investasi Daerah secara bersama-sama dalam satu model terhadap kemandirian daerah pada seluruh kabupaten/kota di Provinsi Aceh dengan data panel terbaru periode 2021–2025 dan estimasi *Fixed Effect Model* yang mengendalikan karakteristik khas masing-masing daerah. Rumusan masalah penelitian ini adalah: (1) apakah PAD berpengaruh terhadap kemandirian daerah; (2) apakah Transfer Pusat berpengaruh terhadap kemandirian daerah; dan (3) apakah Investasi Daerah berpengaruh terhadap kemandirian daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Hipotesis yang diajukan adalah PAD berpengaruh positif dan signifikan (H1), Transfer Pusat berpengaruh negatif dan signifikan (H2), dan Investasi Daerah berpengaruh positif dan signifikan (H3) terhadap kemandirian daerah. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian keuangan sektor publik serta menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah kabupaten/kota di Aceh dalam merumuskan kebijakan pengelolaan keuangan daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder berbentuk data panel, yaitu gabungan data *cross-section* dan *time series* yang mengamati perilaku unit yang sama sepanjang waktu. Objek penelitian adalah PAD, Transfer Pusat, Investasi Daerah, dan Kemandirian Daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Populasi penelitian mencakup seluruh 23 kabupaten/kota di Provinsi Aceh yang terdiri atas 18 kabupaten dan 5 kota. Sampel ditentukan dengan teknik sampling jenuh, yaitu seluruh anggota populasi dijadikan sampel (Sugiyono, 2013). Periode pengamatan adalah tahun 2021–2025, sehingga diperoleh 114 observasi dalam bentuk panel tidak seimbang (*unbalanced panel*).

Data diperoleh melalui metode dokumentasi dan studi literatur dari laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing kabupaten/kota yang dipublikasikan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan melalui laman resmi www.djpk.kemenkeu.go.id (Handayani, 2020; Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2025). Definisi operasional dan pengukuran variabel penelitian disajikan pada Tabel 1. Variabel PAD, Transfer Pusat, dan Investasi Daerah yang berupa nilai nominal ditransformasikan ke dalam bentuk logaritma natural ($\ln$) untuk menyeragamkan skala data, sedangkan Kemandirian Daerah dinyatakan dalam bentuk rasio.

Tabel 1. Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi	Pengukuran	Skala
Kemandirian Daerah (KD)	Kemampuan pemerintah daerah membiayai pemerintahan dan pembangunan dengan PAD tanpa ketergantungan tinggi pada pemerintah pusat	$PAD / (Transfer\ Pusat + Transfer\ Provinsi + Pinjaman) \times 100\%$	Rasio
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Penerimaan daerah yang bersumber dari wilayahnya sendiri dan dipungut berdasarkan peraturan daerah	Ln total realisasi PAD	Nominal
Transfer Pusat (TP)	Dana APBN yang disalurkan kepada pemerintah daerah untuk mendukung desentralisasi fiskal	Ln (DAU + DAK + DBH)	Nominal
Investasi Daerah (ID)	Penanaman modal untuk meningkatkan kapasitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah	Ln total realisasi belanja modal	Nominal

(Sumber: Halim, 2014; Hutagaol et al., 2023; Setyawan, 2023; Zulvan & Purbasari, 2024, diolah 2026)

Data dianalisis menggunakan regresi data panel dengan bantuan program EViews 12 melalui persamaan $KD_{it} = \beta_0 + \beta_1 PAD_{it} + \beta_2 TP_{it} + \beta_3 ID_{it} + e_{it}$, di mana i menunjukkan kabupaten/kota dan t menunjukkan tahun. Pemilihan model terbaik di antara *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM), dan *Random Effect Model* (REM) dilakukan melalui uji Chow (CEM terhadap FEM), uji Hausman (FEM terhadap REM), dan uji Lagrange Multiplier (CEM terhadap REM) apabila diperlukan (Gujarati & Porter, 2012). Model terpilih selanjutnya diuji dengan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas dengan Jarque-Bera, uji heteroskedastisitas dengan uji Glejser, uji multikolinearitas dengan matriks korelasi antarvariabel bebas (batas 0,8), dan uji autokorelasi dengan statistik Durbin-Watson (Ghozali, 2016; Supiah, 2024). Pengujian hipotesis dilakukan secara parsial menggunakan uji t pada taraf signifikansi 5%, dengan kriteria hipotesis diterima apabila nilai probabilitas kurang dari 0,05 dan arah koefisien sesuai dengan hipotesis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Provinsi Aceh terletak di ujung utara Pulau Sumatera dengan luas wilayah sekitar 56.835 km² dan terbagi atas 23 kabupaten/kota. Selama periode 2021–2025, PAD kabupaten/kota di Aceh cenderung meningkat tetapi belum merata. Kota Banda Aceh merupakan daerah dengan PAD tertinggi, yang meningkat dari Rp224,36 miliar pada tahun 2021 menjadi Rp360,70 miliar pada tahun 2025, sedangkan beberapa daerah seperti Kota Sabang, Kabupaten Gayo Lues, dan Kota Subulussalam justru mengalami penurunan PAD. Sebaliknya, total transfer pusat yang diterima kabupaten/kota di Aceh berada pada kisaran Rp17,25 triliun hingga Rp18,84 triliun per tahun, dengan penerima terbesar pada tahun 2025 adalah Kabupaten Aceh Utara sebesar Rp1,50 triliun. Besarnya transfer dibandingkan PAD menegaskan tingginya ketergantungan fiskal daerah. Nilai investasi daerah juga timpang, dengan nilai tertinggi pada tahun 2025 di Kabupaten Aceh Utara sebesar Rp226,63 miliar dan terendah di Kabupaten Simeulue sebesar Rp7,94 miliar. Statistik deskriptif variabel penelitian disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Statistik	KD	PAD (Ln)	TP (Ln)	ID (Ln)
Mean	0,1518	25,3347	27,3319	25,5350
Median	0,1385	25,4776	27,2961	25,5999
Maksimum	0,4345	26,6113	28,0694	26,5546
Minimum	0,0037	21,4164	26,7558	22,7952
Std. Deviasi	0,0696	0,7099	0,3228	0,6091
Observasi	114	114	114	114

(Sumber: Data DJPK diolah EViews 12, 2026)

Berdasarkan Tabel 2, rata-rata Kemandirian Daerah sebesar 0,1518 atau 15,18%, dengan nilai maksimum 0,4345 dan nilai minimum 0,0037. Rentang yang lebar tersebut menunjukkan adanya kesenjangan kemampuan fiskal yang cukup besar antarkabupaten/kota, meskipun secara rata-rata tingkat kemandirian masih berada pada kategori rendah sekali. Variabel PAD memiliki rata-rata 25,3347 dengan standar deviasi 0,7099, Transfer Pusat memiliki rata-rata 27,3319 dengan standar deviasi 0,3228, dan Investasi Daerah memiliki rata-rata 25,5350 dengan standar deviasi 0,6091. Rata-rata Transfer Pusat yang lebih tinggi dibandingkan PAD dan Investasi Daerah mengonfirmasi bahwa dana transfer masih menjadi sumber pendapatan dominan, sedangkan standar deviasinya yang paling kecil menunjukkan bahwa alokasi transfer antardaerah relatif lebih merata dibandingkan PAD.

Pemilihan Model Regresi Data Panel

Pemilihan model regresi data panel dilakukan melalui uji Chow dan uji Hausman. Hasil pengujian disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Hasil Uji Pemilihan Model

Pengujian	Statistik	d.f.	Prob.	Keputusan
Uji Chow (Cross-section F)	17,5012	(22,88)	0,0000	FEM
Uji Chow (Cross-section Chi-square)	191,7270	22	0,0000	FEM
Uji Hausman (Cross-section random)	63,7134	3	0,0000	FEM

(Sumber: Data DJPK diolah EViews 12, 2026)

Hasil uji Chow menunjukkan nilai probabilitas *cross-section chi-square* sebesar $0,0000 < 0,05$, sehingga FEM lebih tepat dibandingkan CEM. Selanjutnya, hasil uji Hausman menunjukkan nilai probabilitas *cross-section random* sebesar $0,0000 < 0,05$, sehingga FEM lebih tepat dibandingkan REM. Karena kedua pengujian secara konsisten memilih FEM, uji Lagrange Multiplier tidak perlu dilakukan dan FEM ditetapkan sebagai model estimasi dalam penelitian ini. Pemilihan FEM juga sejalan dengan karakteristik data, sebab setiap kabupaten/kota di Aceh memiliki perbedaan struktur ekonomi, potensi pendapatan, dan kapasitas kelembagaan yang relatif tetap sepanjang periode pengamatan.

Uji Asumsi Klasik

Hasil uji normalitas menunjukkan nilai Jarque-Bera sebesar 67,3756 dengan probabilitas $0,0000 < 0,05$, sehingga residual tidak berdistribusi normal. Namun demikian, asumsi normalitas bukan merupakan

syarat agar estimator bersifat *Best Linear Unbiased Estimator* (BLUE), dan dengan jumlah observasi sebanyak 114 distribusi estimator cenderung mendekati normal berdasarkan *Central Limit Theorem* (Gujarati & Porter, 2012), sehingga analisis dapat dilanjutkan. Hasil uji heteroskedastisitas dengan uji Glejser menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0,1702 (PAD), 0,6442 (Transfer Pusat), dan 0,9178 (Investasi Daerah), yang seluruhnya lebih besar dari 0,05, sehingga model terbebas dari gejala heteroskedastisitas. Hasil uji multikolinearitas menunjukkan koefisien korelasi antara PAD dan Transfer Pusat sebesar 0,6638, antara PAD dan Investasi Daerah sebesar 0,4751, serta antara Transfer Pusat dan Investasi Daerah sebesar 0,4598. Seluruh nilai tersebut berada di bawah 0,8, sehingga tidak terjadi multikolinearitas. Adapun nilai statistik Durbin-Watson sebesar 1,3685 berada pada rentang -2 hingga +2, sehingga model dinilai tidak mengalami masalah autokorelasi yang serius dan layak digunakan untuk pengujian hipotesis.

Estimasi Fixed Effect Model dan Pengujian Hipotesis

Hasil estimasi FEM beserta pengujian hipotesis secara parsial (uji t) disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Hasil Estimasi Fixed Effect Model dan Uji t

Variabel	Koefisien	Std. Error	t-Statistic	Prob.	Keterangan
Konstanta (C)	1,2314	1,2246	1,0056	0,3175	-
PAD (X1)	0,0608	0,0045	13,4768	0,0000	H1 diterima
Transfer Pusat (X2)	-0,0935	0,0459	-2,0352	0,0450	H2 diterima
Investasi Daerah (X3)	-0,0025	0,0051	-0,4967	0,6206	H3 ditolak
R-squared	0,9562		F-statistic	63,349	
Adjusted R-squared	0,9411		Prob (F-stat)	0,0000	

(Sumber: Data DJPK diolah EViews 12, 2026)

Berdasarkan Tabel 4, persamaan regresi data panel yang diperoleh adalah $KD = 1,2314 + 0,0608PAD - 0,0935TP - 0,0025ID$. Koefisien PAD yang bernilai positif menunjukkan bahwa peningkatan PAD sebesar 1% berasosiasi dengan kenaikan rasio kemandirian daerah sekitar 0,06 poin persentase, dengan asumsi variabel lain konstan. Koefisien Transfer Pusat yang bernilai negatif menunjukkan bahwa peningkatan transfer sebesar 1% berasosiasi dengan penurunan rasio kemandirian sekitar 0,09 poin persentase, sedangkan koefisien Investasi Daerah bernilai negatif dengan besaran yang sangat kecil. Nilai *Adjusted R-squared* sebesar 0,9411 menunjukkan bahwa variabel-variabel dalam model, termasuk efek tetap masing-masing kabupaten/kota dan periode, mampu menjelaskan 94,11% variasi Kemandirian Daerah, sedangkan sisanya sebesar 5,89% dijelaskan oleh faktor lain di luar model. Nilai F-statistic sebesar 63,349 dengan probabilitas $0,0000 < 0,05$ menunjukkan bahwa model regresi secara keseluruhan layak digunakan. Pengujian hipotesis dilakukan dengan membandingkan nilai t hitung terhadap t tabel sebesar 1,6589 ($df = 110$; $\alpha = 5\%$) serta nilai probabilitas terhadap 0,05.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kemandirian Daerah

Hasil pengujian menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemandirian Daerah, dengan nilai t hitung $13,4768 > t$ tabel 1,6589 dan probabilitas $0,0000 < 0,05$, sehingga H1 diterima. PAD juga merupakan variabel dengan nilai t hitung terbesar, yang menandakan bahwa PAD adalah

determinan utama kemandirian daerah pada kabupaten/kota di Aceh. Temuan ini sejalan dengan teori federalisme fiskal yang menempatkan kapasitas penerimaan sendiri sebagai fondasi kemandirian pemerintah daerah (Oates, 1972). Peningkatan PAD mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam menggali dan mengelola potensi ekonomi lokal, sehingga semakin besar porsi belanja yang dapat dibiayai dari sumber sendiri dan semakin kecil ketergantungan terhadap dana transfer. Hasil ini konsisten dengan penelitian Machfud et al. (2020) pada kabupaten/kota di Aceh, Rahmawati (2024), serta Putri dan Berliani (2025) yang menemukan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, namun berbeda dengan Farrakhy dan Dewi (2025) yang tidak menemukan pengaruh signifikan. Perbedaan tersebut dapat disebabkan oleh karakteristik daerah Aceh yang memiliki ketimpangan PAD cukup lebar antarkabupaten/kota, sehingga variasi PAD berdampak nyata terhadap perbedaan tingkat kemandirian.

Pengaruh Transfer Pusat terhadap Kemandirian Daerah

Hasil pengujian menunjukkan bahwa Transfer Pusat berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kemandirian Daerah, dengan nilai $|t \text{ hitung}| 2,0352 > t \text{ tabel } 1,6589$ dan probabilitas $0,0450 < 0,05$, sehingga H_2 diterima. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin besar dana transfer yang diterima, tingkat kemandirian daerah cenderung menurun. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya gejala *flypaper effect*, di mana ketersediaan dana transfer yang besar belum mendorong pemerintah daerah untuk mengoptimalkan potensi PAD, bahkan cenderung mengurangi insentif untuk melakukan upaya fiskal secara mandiri (Zakaria & Lathifah, 2024; Dewi et al., 2024). Ketergantungan yang berlebihan terhadap transfer juga dinilai dapat melemahkan mobilisasi pendapatan daerah dalam kerangka desentralisasi fiskal (World Bank, 2022; Debora et al., 2023). Hasil ini sejalan dengan penelitian Rahmawati (2024) serta Farrakhy dan Dewi (2025) yang menemukan bahwa dana transfer atau dana perimbangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, tetapi berbeda dengan Khoiriyah (2019) yang menemukan pengaruh positif namun tidak signifikan.

Pengaruh Investasi Daerah terhadap Kemandirian Daerah

Hasil pengujian menunjukkan bahwa Investasi Daerah berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap Kemandirian Daerah, dengan nilai $|t \text{ hitung}| 0,4967 < t \text{ tabel } 1,6589$ dan probabilitas $0,6206 > 0,05$, sehingga H_3 ditolak. Temuan ini menunjukkan bahwa investasi daerah yang diprosikan melalui realisasi belanja modal belum mampu meningkatkan kemandirian daerah pada periode pengamatan. Manfaat investasi terhadap perekonomian dan kapasitas fiskal daerah umumnya memerlukan waktu untuk terwujud, karena investasi harus terlebih dahulu menghasilkan aktivitas ekonomi baru sebelum dapat memperluas basis pajak dan retribusi daerah. Selain itu, besarnya realisasi investasi belum tentu mencerminkan efektivitasnya apabila dialokasikan pada kegiatan yang kurang produktif atau tidak berkaitan langsung dengan sumber penerimaan daerah. Hasil ini berbeda dengan temuan Afiah et al. (2021) serta Yusiawati dan Marhaeni (2020) yang menemukan pengaruh positif investasi terhadap kemandirian keuangan daerah. Perbedaan tersebut mengisyaratkan bahwa di Aceh, investasi daerah perlu diarahkan secara lebih selektif pada sektor-sektor yang memiliki efek pengganda terhadap penerimaan daerah agar kontribusinya terhadap kemandirian fiskal dapat terlihat dalam jangka panjang (Reza & Sopiana, 2023).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Transfer Pusat, dan Investasi Daerah terhadap Kemandirian Daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Aceh periode 2021–2025, dapat disimpulkan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan serta menjadi faktor paling dominan dalam meningkatkan kemandirian daerah. Transfer Pusat berpengaruh negatif dan signifikan, yang menunjukkan bahwa tingginya ketergantungan terhadap dana transfer justru menurunkan tingkat kemandirian daerah. Sementara itu, Investasi Daerah berpengaruh negatif namun tidak signifikan, sehingga investasi yang direalisasikan belum mampu memperkuat kapasitas fiskal daerah dalam jangka pendek. Temuan ini menegaskan bahwa kemandirian fiskal kabupaten/kota di Aceh terutama ditentukan oleh kemampuan daerah dalam menggali sumber pendapatan sendiri, bukan oleh besarnya dana yang diterima dari pemerintah pusat.

Pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Aceh disarankan untuk mengoptimalkan PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak serta retribusi daerah, digitalisasi administrasi penerimaan, dan pengelolaan aset serta Badan Usaha Milik Daerah secara profesional. Dana transfer perlu dimanfaatkan sebagai stimulus untuk mengembangkan potensi ekonomi lokal agar ketergantungan fiskal dapat dikurangi secara bertahap, sedangkan investasi daerah perlu diarahkan pada kegiatan produktif yang berdampak langsung terhadap perluasan basis penerimaan daerah. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada periode pengamatan yang relatif pendek dan jumlah variabel yang terbatas. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperpanjang periode pengamatan, menambahkan variabel lain seperti Dana Otonomi Khusus, pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, dan belanja daerah, serta mempertimbangkan pengaruh investasi dengan jeda waktu (*lag*) guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Afiah, N. N., Mulyani, S., & Ulfi, I. H. (2021). Investasi daerah dan e-government serta implikasinya terhadap kemandirian daerah. *Bina Ekonomi*, 25(2), 115–134.
- Agustin, M. S., Mintarti, S., & Defung, F. (2023). Pengaruh inflasi, PDRB, pengeluaran pemerintah dan investasi terhadap pendapatan asli daerah dan tingkat kesenjangan daerah. *KINERJA: Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 20(3), 395–405.
- Debora, D., Kantohe, M., Tarore, S., & Rantung, M. (2023). Pengaruh pendapatan asli daerah dan dana transfer ke daerah terhadap kemandirian keuangan daerah pada kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Administro: Jurnal Kajian Kebijakan dan Ilmu Administrasi Negara*, 5(2), 123–129.
- Dewi, N. A. W. T., Dewi, L. G. K., & Wiguna, I. G. N. H. (2024). Analisis flypaper effect dan implikasinya terhadap kemandirian fiskal daerah: Efek moderasi upaya pajak. *Juara: Jurnal Riset Akuntansi*, 14(1), 1–19.
- Fadhilla, R. N., Nissa, D. N. F., & Putri, M. A. (2025). Menakar kemandirian keuangan daerah: Studi kasus ketergantungan fiskal Kabupaten Magelang 2020–2024. *Jurnal Kajian Ekonomi & Keuangan Daerah*, 10(2), 129–143.
- Farrakhy, S. D., & Dewi, S. P. (2025). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan, belanja pegawai, dan belanja modal terhadap kemandirian keuangan daerah. *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 5(10).

- Fitriano, Y., & Ferina, Z. I. (2021). Analisis efektifitas dan kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kota Bengkulu. *EKOMBIS Review: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 9(1), 69–80.
- Ghozali, I. (2016). Aplikasi analisis multivariete dengan program IBM SPSS (Cetakan VIII). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2012). *Dasar-dasar ekonometrika* (Edisi 5). Salemba Empat.
- Halim, A. (2014). *Akuntansi keuangan daerah* (Edisi 4). Salemba Empat.
- Handayani, R. (2020). *Metodologi penelitian sosial budaya*. Bumi Aksara.
- Hutagaol, K. U., Siahaan, S. B., & Ginting, M. C. (2023). Analisis kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Toba. *Jurnal Skripsi Akuntansi*, 1(1), 88–95.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2025). Data realisasi APBD. <https://www.djpk.kemenkeu.go.id>
- Khoiriyah, S. (2019). Analisis pengaruh pendapatan asli daerah, transfer pemerintah pusat dan efisiensi belanja daerah terhadap kemandirian keuangan daerah [Skripsi]. Universitas Semarang.
- Kinanti, M. A., & Santorry, S. (2025). Pengaruh dana transfer terhadap kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota di Provinsi DIY 2014–2024. *Jurnal Manajemen Keuangan Publik*, 9(2), 138–157.
- Latifa, A., Frinaldi, A., Magriasti, L., & Naldi, H. (2025). Desentralisasi fiskal: Tantangan pengelolaan pengeluaran daerah dalam mewujudkan otonomi keuangan daerah. *Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 7(3), 411–417.
- Machfud, M., Asnawi, A., & Naz'aina, N. A. (2020). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dana otonomi khusus dan tingkat kemiskinan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah di kabupaten/kota Provinsi Aceh. *J-MIND (Jurnal Manajemen Indonesia)*, 5(1), 14–31.
- Mulkan, H., & Aprita, S. (2023). *Hukum otonomi daerah*. Mitra Wacana Media.
- Oates, W. E. (1972). *Fiscal federalism*. Harcourt Brace Jovanovich.
- Pemerintah Indonesia. (2006). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
- Pemerintah Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Pemerintah Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- Pratama, A. T., Putri, D. G., Mayasari, M., & Malik, A. (2025). Tantangan dan peluang otonomi daerah dalam mendukung keberlanjutan pertumbuhan ekonomi lokal. *Kalianda Halok Gagas*, 8(1), 1–16.
- Putri, I. N., & Berliani, K. (2025). Pengaruh PAD, belanja daerah, dan SiLPA terhadap kemandirian keuangan daerah Kota Tangerang Selatan 2015–2024. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(6), 9128–9140.
- Rahmawati, M. (2024). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana transfer ke daerah, dan belanja modal terhadap kemandirian daerah pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun 2019–2023 [Skripsi]. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Reza, M., & Sopiana, Y. (2023). Analisis PDRB perkapita, investasi pemerintah, dan inflasi terhadap kemandirian keuangan daerah Kota Banjarmasin. *JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan*, 6(1), 477–488.
- Sugiyono. (2013). *Metode penelitian pendidikan: Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Supiah, I. (2024). Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan laba pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia [Skripsi]. Universitas Malikussaleh.

- World Bank. (2022, November 15). Subnational revenue mobilization: A critical issue for success in fiscal decentralization. World Bank Blogs.
- Yusiawati, D., & Marhaeni, A. A. I. N. (2020). Effect of investment, GRDP per capita, and original local government revenue on regional financial independence through capital expenditure as intervening variables. *International Research Journal of Management, IT and Social Sciences*, 7(6), 96–108.
- Zakaria, R. A., & Lathifah, N. (2024). Analisis flypaper effect pada belanja daerah kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur tahun 2016–2022. *Juremi: Jurnal Riset Ekonomi*, 3(5), 543–554.
- Zulvan, M. F., & Purbasari, H. (2024). Pengaruh investasi, belanja modal, dan pendapatan asli daerah pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi. *Jurnal EMT KITA*, 8(1), 175–186.